



Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand: Penguatan *Local Currency Settlement* (LCS) Framework dalam Memfasilitasi Perdagangan

Aldy Nofansya

Program Studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Indonesia;
aldy18001@mail.unpad.ac.id

Hasan Sidik

Program Studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Indonesia;
hasan.sidik@unpad.ac.id

| Submit: 04-07-2022 | accept: 08-08-2022 | publish: 12-08-2022 |

Keywords

International
Cooperation;
Economy; Trade;
Local Currency
Settlement;
Indonesia-
Malaysia-Thailand

ABSTRACT

The Indonesia-Malaysia-Thailand Local Currency Settlement (LCS) cooperation is a collaboration that uses local currency for trade transactions settlement between the three countries. LCS implementation as an alternative to trade transaction settlement currently has a major challenge related to awareness. This makes export-import actors unfamiliar, reluctant, and hesitant in choosing LCS for the transaction. It hinders the LCS objectives and benefits achievement, so the benefits are relatively small and less significant. This research aims to explain how the strengthening of local currency settlement is carried out in facilitating economic cooperation between Indonesia, Malaysia, and Thailand, especially in the trade sector. This research uses cooperation and international trade concepts. The researcher uses descriptive-based qualitative, through literature review and interviews. The researcher found that there are at least two things that can be done to encourage the LCS utilization in strengthening trade to promote Indonesia-Malaysia-Thailand economic cooperation. (1) Strengthening the role of LCS stakeholders through the National Economic Recovery (PEN) program, Quick Wins, Strategic Communication Campaign and National Task Force. (2) Encouraging business actors in the leading and potential product sector to choose LCS as an alternative to trading transactions.

Kata Kunci

Kerja sama
Internasional;
Ekonomi;
Perdagangan; *Local
Currency
Settlement*;
Indonesia-Malaysia-
Thailand

ABSTRAK

Kerja sama *local currency settlement* (LCS) Indonesia-Malaysia-Thailand merupakan kerja sama dalam memanfaatkan penggunaan mata uang lokal untuk penyelesaian transaksi perdagangan diantara ketiga negara. Kerja sama ini masih memiliki serangkaian tantangan utama, yaitu terkait *awareness*. Hal ini yang membuat para pelaku ekspor-impor umumnya belum mengenal, enggan, dan ragu dalam memilih bertransaksi menggunakan LCS. Akibatnya menghambat ketercapaian tujuan dan manfaat dari kerja sama LCS, sehingga manfaatnya relatif kecil, dan kurang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penguatan *local currency settlement* dilakukan dalam memfasilitasi kerja sama ekonomi antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand khususnya dalam bidang perdagangan. Penelitian ini menggunakan konsep kerja sama dan perdagangan internasional. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan basis deskriptif, melalui data yang didapat dengan studi literatur dan wawancara. Peneliti menemukan bahwa setidaknya terdapat dua upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong penggunaan LCS dalam memperkuat perdagangan, sehingga dapat menjadi promotor kerja sama ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand. (1) Penguatan peran stakeholder LCS melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), *Quick Wins*, *Strategic Communication Campaign* dan *National Task Force*. (2), mendorong pelaku usaha di sektor produk unggulan dan potensial dalam memilih LCS sebagai alternatif transaksi perdagangan.

PENDAHULUAN

Bagi Indonesia, Malaysia dan Thailand merupakan 2 mitra dagang besar pada lingkup kawasan Asia Tenggara. Ketiganya sudah lama memiliki kerja sama ekonomi dalam bidang perdagangan secara intensif. Berdasarkan data statistik yang diperoleh dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS), Malaysia dan Thailand merupakan dua negara yang masuk pada 10 mitra dagang utama Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2017).

Dalam perdagangan internasional penggunaan mata uang dolar menjadi alat tukar utama ketika melakukan transaksi. Bagi Indonesia, pengalaman buruk atas krisis finansial dolar Amerika Serikat menjadi pertimbangan kebijakan. Begitu pula dengan Malaysia dan Thailand yang mempunyai pengalaman yang serupa. Terlebih pada rentan tahun 2016-2017 pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat terus kian meningkat. Hal ini berdampak pada tren suku bunga Amerika Serikat yang juga turut meningkat. Alhasil seluruh mata uang negara di dunia berpotensi tertekan akibat kembalinya aliran modal Amerika Serikat. Ketergantungan terhadap dolar pada saat itu menjadi perhatian pemerintah Indonesia.

Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia menggandeng Malaysia dan Thailand melalui bank sentralnya untuk membahas dan menyepakati kerja sama ekonomi dalam menggunakan mata uang lokal sebagai alat tukar untuk melakukan transaksi perdagangan diantara ketiga negara, yang selanjutnya disebut dengan *Local Currency Settlement (LCS) framework*. Kerja sama ini tentunya diarahkan guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat yang kian menguat dan menimbulkan kondisi serba ketidakpastian yang berpotensi mengancam keamanan ekonomi ketiga negara. Kesepakatan ini ditandatangani oleh ketiga negara melalui bank sentralnya yaitu Bank Negara Malaysia (BNM), *Bank of Thailand* (BOT) dan Bank Indonesia (BI), pada tanggal 11 Desember 2017. Pembentukan kerja

sama LCS ini dimaksudkan untuk mencapai beberapa tujuan, diantaranya seperti; 1) meningkatkan hubungan baik khususnya dalam bidang perdagangan antara Indonesia–Malaysia–Thailand. Terlebih ketiganya merupakan sesama mitra dagang terbesar di lingkup kawasan; 2) Mendorong potensi penggunaan mata uang lokal dalam bertransaksi dan mengurangi ketergantungan terhadap dolar (US\$), dengan harapan mampu untuk mendayagunakan mata uang lokal (ringgit, baht, dan rupiah) supaya stabil dalam perdagangan ekspor-impor 3) Memelihara stabilitas sistem keuangan negara, mendiversifikasikan risiko yang berpotensi mengganggu kestabilan sistem keuangan (Asian Development Bank, 2017).

Penerapan *local currency settlement* sebagai solusi dan alternatif penyelesaian transaksi perdagangan di Indonesia-Malaysia-Thailand saat ini masih memiliki serangkaian masalah utama perihal awareness di kalangan masyarakat. Sehingga banyak pelaku usaha yang belum mengenal, enggan, atau bahkan ragu dalam menerapkan *local currency settlement*. Disamping itu, didasarkan pula pada pertimbangan antara manfaat dan resiko dari perspektif pelaku usaha. Akibatnya, hal ini menghambat ketercapaian tujuan dari penerapan *local currency settlement*, sehingga menjadi relatif kecil dan tidak signifikan. Melihat fakta tersebut, Peneliti merasa perlu untuk melakukan serangkaian analisis mendalam terhadap proses kerja sama ekonomi Indonesia, Malaysia dan Thailand dalam mendorong sektor perdagangan dengan menerapkan kerangka kerja *local currency settlement*.

Dalam menegaskan kebaruan atau *novelty* dari penelitian yang akan peneliti angkat, peneliti telah merujuk pada beberapa penelitian terdahulu dengan melakukan telaah pustaka dan pengelompokan sesuai dengan topik pembahasannya sebagai referensi. Sehingga peneliti dapat memperlihatkan kebaruan dari topik penelitian yang diangkat Yaitu (1) kerja sama ekonomi subregional, (2) perdagangan internasional, (3) Penguatan *local currency settlement*.

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Budi Ryanto (2015), Benito Rio Avianto dan Raldi Hendro Koestoer (2010), Chalongphob Sussangkarn (2020), Hanbo Wang (2019), Priyadarshi Dash (2019), dan Hadi Nur Muta'ali (2020) belum ada yang membahas mengenai upaya penguatan *local currency settlement* untuk memfasilitasi perdagangan. Berdasarkan dari permasalahan dan kabaruan penelitian, peneliti bertujuan untuk menganalisis bagaimana upaya memperkuat *local currency settlement* dalam memfasilitasi perdagangan sebagai promotor kerja sama ekonomi sub-regional (Indonesia, Malaysia, dan Thailand) bidang perdagangan.

KERANGKA KONSEPTUAL

Kerja Sama Ekonomi Internasional

Konsep kerja sama ekonomi merupakan jawaban atas munculnya tantangan baru dalam proses globalisasi dan integrasi komersial yang menuntut konsep kerja sama sebagai variabel yang relevan untuk dimasukkan. Tidak hanya dalam hubungan politik antar negara tetapi juga dalam hubungan ekonomi yang terjalin dalam konteks internasional. O'Farrill dan tim penulis (1999) menambahkan penjelasan mengenai kerja sama ekonomi, bahwa kerja sama ekonomi merupakan konsep yang kompleks, dan tidak cukup didefinisikan, umumnya berkaitan dengan kerja sama industri, keuangan, komersial, kewirausahaan, dan mengenai produksi. Selanjutnya, kerja sama ekonomi diidentifikasi sebagai komponen kerja sama internasional yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang memfasilitasi proses integrasi komersial dan keuangan di lingkungan internasional dengan menerapkan tindakan yang dimaksudkan untuk membawa manfaat ekonomi jangka menengah dan jangka panjang secara tidak langsung (O'Farrill, Fierro, Moraga, Pérez, & Vallejos, 1999). Dari penjelasan O'Farill dan tim, dapat dipahami bahwa kerja sama ekonomi yang dilakukan antar negara secara spesifik merujuk pada upaya mencapai kesejahteraan dengan menyelesaikan tantangan dan hambatan pada berbagai jenis kegiatan perekonomian Kerja

sama ekonomi internasional tentunya didasarkan pada serangkaian kepentingan negara-negara untuk memperoleh tujuan bersama dan dilaksanakan sesuai peran masing-masing negara sebagai pelaku kerja sama. Adapun Enrique O'Farrill dan tim (2015) menjelaskan bahwa jika dilihat dari perspektif negara sebagai pelaku kerja sama, dibutuhkan adanya beberapa fitur utama yang menjadi konsiderasi negara dalam melaksanakan kerja sama ekonomi internasional, diantaranya sebagai berikut:

- 1) ***Economic benefit***: secara definisi kerja sama tradisional diartikan sebagai serangkaian tindakan untuk mengkoordinasikan kebijakan atau menggabungkan upaya suatu pihak dalam mencapai tujuan bersama di lingkup internasional. Hal ini tetap valid dan dinilai baik kebenarannya. Akan tetapi, pada pelaksanaan kerja sama ekonomi internasional penekanan pada tujuan dapat berubah menjadi lebih spesifik. Hal ini karena tujuan kerja sama jenis ini secara langsung bersifat ekonomi dan biasanya berhubungan pada sektor perdagangan dan arus modal.
- 2) ***Emphasis on the relationship between partners***: Fondasi dari pada kerja sama adalah saling kepercayaan antara pelaku kerja sama itu sendiri. Maka dari itu, hubungan diantara mitra kerja sangat penting untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaan kerja sama tersebut sehingga dapat memperoleh mutual benefit. Setiap aktor atau pelaku kerja sama haruslah memiliki hubungan baik, karena mau tidak mau harus bekerja saling menguntungkan dan pembiayaan bersama dalam jangka menengah dan panjang.
- 3) ***Inclusion of the Private Sector***: proses kerja sama bidang ekonomi akan secara langsung berkaitan dengan proses integrasi perdagangan.
- 4) ***The changing role of the state***: dalam hal ini negara akan menjadi peran utama dalam pelaksanaan kerja sama ekonomi. Peran negara sangat penting untuk memastikan kualitas terbaik pada arena internasional dengan mendorong perkembangan teknologi

dan produktif suatu negara. Keterlibatan swasta dapat membantu pelaksanaan kerja sama ekonomi dan berperan sebagai elemen penentu dalam proses kerja sama. Dalam hal ini pemerintah berperan sebagai fasilitator dan inisiatif articulator daripada langsung mengimplementasikan kebijakan.

- 5) ***Secure indirect short and medium term:*** Tindakan atau kegiatan yang dilakukan dalam kerangka kerja sama ekonomi biasanya terfokus atau berpusat pada penciptaan kondisi untuk memfasilitasi perdagangan dan keterampilan kompetitif di pasar dunia. Oleh karena itu, pemaksimalan manfaat ekonomi langsung dalam jangka pendek adalah hal yang asing bagi kegiatan atau tindakan kerja sama ekonomi. Karena umumnya untuk memaksimalkan tujuan dari kegiatan kerja sama ekonomi internasional, khususnya dalam perdagangan, diperlukan diperlukan waktu (proses).

Penggunaan konsep kerja sama internasional pada penelitian ini memfokuskan kerja sama internasional yang mengarah pada peran lembaga pemerintah sebagai aktor negara melalui kegiatan kerja sama *local currency settlement* antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand dalam memperkuat sektor perdagangan melalui kebijakan *local currency settlement framework*.

Kerja Sama Sub-Regional

Mengutip dari Chaia Siow Yue (1997) dalam tulisan Budi Ryanto (2015) dijelaskan bahwa terdapat beberapa keunggulan dan manfaat dari implementasi kerja sama pada level sub-regional (Riyanto, 2015). Diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan kerja sama pada level sub-regional dapat menjadi salah satu alternatif apabila terdapat hambatan atau kendala dari ketercapaian tujuan kerja sama ekonomi pada tingkat regional secara utuh. Hambatan atau kendala yang dihadapi oleh negara-negara pelaku kerja sama umumnya terjadi karena ada perbedaan tahapan pembangunan ekonomi pada level regional,

serta ditambah dengan adanya perbedaan pandang sistem politik dan ekonomi di dalamnya.

- 2) Implementasi dari pelaksanaan kerja sama sub-regional umumnya lebih mudah dilaksanakan dan dikelola secara politik, serta dianggap lebih fleksibel dalam menjalankan setiap peranan. karena kerja sama sub-regional tidak memiliki ketentuan ketentuan yang ketat, dalam arti menyesuaikan dengan kesepakatan pelaku kerja sama. Pelaksanaan kerja sama sub-regional pada dasarnya memiliki lingkup yang kecil, namun hal ini tentu menjadi alternatif dari berbagai kendala dan hambatan yang timbul atas framework dari kegiatan kerja sama politik dan ekonomi yang jauh lebih kompleks dan beresiko pada tingkat regional. Kendati demikian, keberhasilan dari kerja sama sub-regional tentu dapat juga diaplikasikan pada lingkup regional yang lebih utuh.
- 3) Kerja Sama sub-regional dapat membantu para pengambil kebijakan dalam menentukan potensi pembangunan ekonomi melalui konektivitas wilayah negara yang terbelakang supaya lebih maju.
- 4) Kerja Sama subregional yang berfokus pada bidang ekonomi memberi ruang pada negara pelaku kerja sama untuk yang saling melengkapi (*economic complementarity*).

Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional telah menjadi kegiatan ekonomi terpenting dalam perekonomian dunia. Meningkatnya saling ketergantungan negara dengan mengedepankan upaya kerja sama antar negara dalam mewujudkan perdamaian, menjadi pendorong perdagangan internasional untuk tumbuh lebih cepat. Pemenuhan permintaan yang semakin tinggi menuntun pola perdagangan internasional yang semakin kompleks sehingga terus menambah bagian dari aktivitas global (Bjelić, 2008).

Dalam proses perdagangan, tentu tidak lepas dari kegiatan transaksi antara penjual dan

pembeli. Transaksi ini merupakan hasil kesepakatan yang telah disepakati bersama antara pihak penjual dan pembeli. Dalam skala internasional, setiap negara tentu terlibat pada kegiatan perdagangan (ekspor-impor) yang mana didalamnya memuat kegiatan transaksi antara satu negara dengan negara lainnya. Dalam transaksi perdagangan internasional, bank sentral dan bank swasta berperan penting dalam memfasilitasi pembayaran keuangan internasional (Balassa, Wonnacott, Allais, Robinson, & Bertrand, 2020).

Adapun upaya dalam memfasilitasi transaksi perdagangan yang dilakukan oleh Bank Sentral Indonesia, Malaysia dan Thailand dalam membentuk kesepakatan bersama melalui kerja sama Local Currency Settlement Framework. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis bagaimana penguatan perdagangan dilakukan melalui sebuah alternatif penyelesaian transaksi dagang dengan mata uang lokal untuk mendorong stabilitas keuangan negara dan mengurangi ketergantungan terhadap US dolar.

METODE RISET

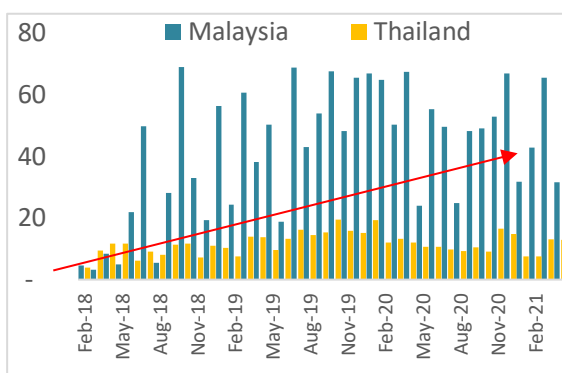
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk melakukan analisis dalam memenuhi tujuan penelitian. Peneliti menggunakan sumber data campuran yaitu primer dan sekunder. Data primer yang dimaksud didapatkan secara langsung dari narasumber melalui kegiatan wawancara. Sedangkan pengambilan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka dan *Internet based research* diantaranya yaitu artikel jurnal, buku-buku, laporan lembaga penelitian, dokumen pemerintah Indonesia, laman resmi pemerintah dan lembaga, serta tulisan media terkemuka. Data yang berhasil dikumpulkan dianalisis dengan teknis analisis Yin (2016) diantaranya sebagai berikut; mengumpulkan, kategorisasi data (pemisahan dan pembongkaran, verifikasi data, interpretasi data, dan pembuatan kesimpulan).

PEMBAHASAN

Perkembangan Penerapan Kerja Sama Local Currency Settlement Indonesia ke Malaysia dan Thailand

Perkembangan implementasi *local currency settlement framework* antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand berhasil menunjukkan nilai dan tren positif sejak secara efektif dimulai pada 2018. Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia menyampaikan pernyataannya bahwa secara umum, transaksi LCS untuk mata uang lokal antara Indonesia dengan *Malaysian Ringgit (MYR)* dan *Thailand Baht (THB)* mengalami peningkatan. LCS MYR meningkat dari \$22.5 juta per bulan di 2018 menjadi 49.6 juta USD per bulan di 2019 dan 50 juta lebih USD di 2020. Sementara itu, transaksi LCS THB menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 sebesar 9.2 juta USD per bulan menjadi 13.7 juta USD per bulan di 2019 (Sjamsudin, 2021). Di tahun 2020, pandemi COVID-19 turut mempengaruhi penurunan transaksi LCS THB yang tercatat sebesar 12.1 juta USD. Perkembangan transaksi LCS pada tahun 2021 (sampai dengan April 2021) tercatat sebesar \$42,9 juta untuk LCS Malaysia, \$10,3 juta untuk LCS Thailand (Sjamsudin, 2021).

Gambar 1. Total Transaksi Bulanan LCS THB dan MYR di Indonesia (Juta USD)



Sumber: Bank Indonesia

Berdasarkan data pada gambar grafik diatas, ditunjukan bahwa perkembangan pelaksanaan *Local Currency Settlement* di Indonesia ke negara Malaysia dan Thailand menunjukkan *trend* positif. Walaupun demikian, nilai transaksi

bulanan Indonesia-Malaysia lebih besar dibandingkan dengan nilai transaksi antara Indonesia dengan Thailand. Bhirawa Praditya Bagaskara dari Departemen Pengembangan Pasar Keuangan (2022) menjelaskan bahwa implementasi penggunaan mata uang lokal sebagai alat transaksi menunjukkan peningkatan dari tahun-ketahun. Hal ini memberikan opsi dan manfaat yang semakin luas bagi para pelaku usaha dalam melakukan transaksi perdagangan (Bagaskara, 2022).

Tabel 1. Perkembangan RRB Transaksi LCS Indonesia ke Malaysia dan Thailand (Ribu USD)

Tahun	Malaysia	Thailand
2018	22,482	9,196
2019	49,623	13,699
2020	51,643	12,328
2021	53,115	19,826

Sumber: Bank Indonesia

Tabel 2. Transaksi LCS Indonesia ke Malaysia dan Thailand (Ribu USD)

Tahun	Malaysia	Thailand
2018	247,305	101,158
2019	595,476	164,390
2020	616,713	147,941
2021	637,384	237,913

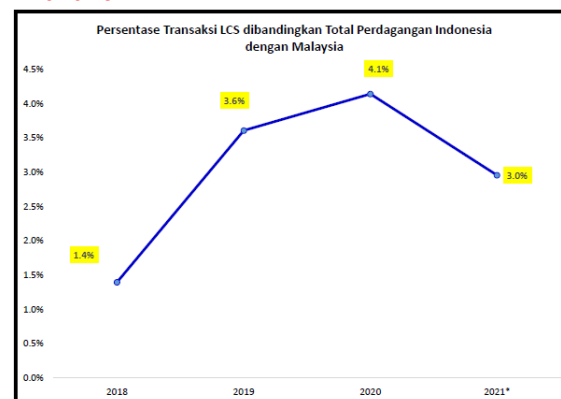
Sumber: Bank Indonesia

Pada Tabel 2, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan secara berkala dari tahun-ketahun untuk perkembangan transaksi LCS Indonesia ke Malaysia dan Thailand. Penurunan hanya terjadi pada tahun 2020 untuk RRB transaksi LCS Indonesia-Thailand yang turun hingga 11,12% dari tahun 2019. Bagaskara (2022) menjelaskan bahwa dalam 4 tahun pelaksanaan kerja sama LCS Indonesia dengan Malaysia dan Thailand berhasil menunjukkan prospek yang baik dengan memberikan peningkatan (positif) disetiap tahunnya (Bagaskara, 2022).

Walaupun perkembangan transaksi menunjukkan *trend* yang positif, akan tetapi nilai transaksi LCS rupiah Indonesia (IDR)-MYR masih terbilang rendah apabila dibandingkan dengan total perdagangan (Indonesia-Malaysia) yang mencapai 15 Miliar USD di tahun 2020 dan 21 Miliar di tahun 2021 (Kementerian Perdagangan, 2022). Perbandingan total

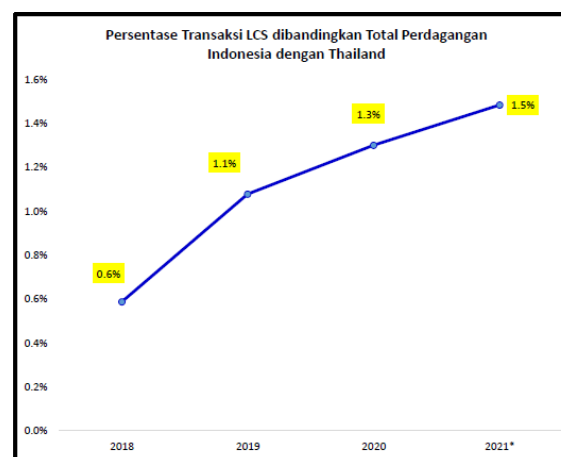
perdagangan dengan transaksi LCS Indonesia-Malaysia yang meningkat ke angka 4.1% di tahun 2020, atau naik hampir 3 kali lipat dibandingkan tahun 2018 yakni 1.4%. Perbulan November 2021, transaksi bilateral Indonesia dan Malaysia dengan mata uang lokal (LCS) baru mampu mencapai 3.0%.

Gambar 2. Peningkatan Transaksi LCS dibandingkan Total Perdagangan Indonesia-Thailand



Sumber: Bank Indonesia

Gambar 3. Peningkatan Transaksi LCS dibandingkan Total Perdagangan Indonesia-Malaysia



Sumber: Bank Indonesia

Pada gambar 4 di atas, ditunjukkan bahwa transaksi LCS Indonesia dan Thailand secara konsisten terus mengalami peningkatan dari tahun 2018. Namun, perbandingan transaksi LCS dari total perdagangan Indonesia-Thailand baru mencapai 1.3% di tahun 2020. Pada dasarnya angka tersebut menunjukkan kenaikan dari tahun 2018 yang hanya mampu mencapai

0,6%. Perbulan November 2021, terjadi peningkatan transaksi LCS Indonesia-Thailand yang berhasil naik sebesar 0,2% hingga mampu mencapai angka 1,5%.

Secara nilai, persentase perbandingan transaksi LCS dengan total perdagangan Indonesia-Thailand lebih kecil apabila dibandingkan dengan persentase antara Indonesia-Malaysia. Walaupun demikian, kerja sama LCS bersama kedua negara tersebut nyatanya bahkan belum mampu mencapai angka 5%. Hal ini tentu menghambat pada perolehan manfaat yang ingin dicapai oleh ketiga negara (Indonesia-Malaysia-Thailand) dalam memperkuat stabilitas nilai mata uang, pertumbuhan ekonomi nasional, dan mendorong kegiatan perdagangan progresif.

Tantangan dari Pelaksanaan Kerja sama LCS Indonesia-Malaysia-Thailand

Perkembangan dari pelaksanaan *local currency Settlement* (LCS) Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Thailand pada dasarnya menunjukkan prospek atau trend yang baik (positif) dari peningkatan nilai transaksi LCS selama periode 2018-2021. Namun pelaksanaan transaksi LCS belum berperan secara signifikan apabila dibandingkan dengan total transaksi perdagangan (Indonesia-Malaysia, Indonesia-Thailand). Selama periode 2018-2021 keniakan transaksi LCS Indonesia bersama kedua negara mitra tersebut bahkan belum mampu mencapai 5% dari total perdagangan pertahunnya. Dengan demikian, peneliti melakukan analisis lebih lanjut terkait tantangan yang perlu dihadapi untuk mendukung perkembangan pelaksanaan LCS Indonesia ke Malaysia dan Thailand.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia, setidaknya terdapat 3 hal yang menjadi tantangan dari implementasi LCS, yakni keterlibatan pelaku usaha, peran stakeholder dalam mendukung LCS, dan komitmen dari ketiga negara (Indonesia, Malaysia, dan Thailand) sebagai penyelenggara. Ketiga tantangan yang tersebut menjadi faktor yang perlu diperhatikan untuk mendorong laju perkembangan LCS.

1) Pelaku Usaha

Pelaku usaha sebagai aktor dalam melakukan transaksi perdagangan tentunya berperan penting dalam pelaksanaan local currency settlement (LCS). Peneliti menganalisis bahwa terdapat sejumlah hambatan atau tantangan yang dimiliki oleh pelaku usaha (selaku eksportir dan importir) diantaranya yaitu pengetahuan dan pemahaman LCS (Awareness) dan tata cara atau proses (Mechanism). Sebagai alternatif transaksi perdagangan yang memberikan opsi baru bagi para pelaku usaha, tentu dibutuhkan adanya pengetahuan dan pemahaman yang lebih bagi pelaku usaha itu sendiri. Bahkan banyak para pelaku usaha yang belum aware terhadap pelaksanaan LCS yang secara efektif sudah berlaku pada 2 Januari 2018. Hal ini tentu harus diselesaikan sebagai prioritas mengingat Bank Indonesia, tidak hanya melibatkan Malaysia dan Thailand dalam kerja sama LCS, tapi juga melibatkan Jepang dan Tiongkok sebagai perluasan negara mitra yang baru. (Bank Indonesia, 2021).

Dengan semakin luasnya kerja sama LCS, pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha juga harus berbanding lurus dengan pelaksanaan LCS itu sendiri. Sehingga banyak pelaku usaha yang tertatik untuk berpindah dan memilih untuk bertransaksi dengan mata uang lokal. Ketiga negara (Indonesia, Malaysia, dan Thailand) melalui otoritas utamanya (Bank Sentral) mempunyai peranan penting dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman dan daya tarik pelaku usaha sebagai aktor utama dalam menjalankan kerja sama LCS.

Berkaitan dengan tata cara atau proses transaksi, pelaku usaha umumnya ingin diberikan kemudahan dalam bertransaksi dengan mekanisme yang mudah dan cepat. Oleh karena itu, fasilitas dari pelaksanaan LCS harus dijamin oleh penyelenggara yaitu Bank Sentral dan Bank ACBD dari ketiga negara, mulai dari regulasi, fasilitas,

insentif dan lain-lain. Penggunaan dolar AS di kalangan masyarakat masih sangat mendominasi untuk kegiatan transaksi perdagangan. Berdasarkan data dari CORE Indonesia, persentase penggunaan dolar AS dalam perdagangan Indonesia tahun 2020 mencapai 93,8% pada aktivitas ekspor, dan 82% untuk aktivitas impor (Mohammad Faisal, 2021). Bersarnya dominasi penggunaan dolar membuat pelaku usaha cenderung sulit untuk berpindah pada alternatif transaksi. Terlebih penggunaan dolar sebagai alat transaksi dari sisi mekanisme juga lebih dikenal (*familiar*) bagi pelaku usaha.

Dalam penggunaan mata uang lokal sebagai alternatif transaksi perdagangan lintas batas negara, diperlukan adanya kesepakatan yang sama dari pelaku usaha yang terlibat (eksportir/importir). Tantangan awareness dan mechanism menjadi dua tantangan utama dalam mendorong signifikannya peran LCS dalam transaksi perdagangan bersama negara mitra (Malaysia dan Thailand). Tantangan dari sisi pelaku usaha sebagai aktor utama tentu harus menjadi prioritas dalam evaluasi pengembangan LCS kedepan.

2) Peran Stakeholder

Peneliti melakukan analisis terkait *stakeholder* atau peran-peran yang terlibat dalam pelaksanaan LCS dan membaginya menjadi 2, yaitu *stakeholder* internal (yang memfasilitasi dan mendukung secara primer) dan eksternal eksternal (yang turut membantu secara sekunder). Adapun *stakeholder* secara internal diantaranya yaitu pemerintah negara, bank sentral, Bank ACCD, dan pelaku usaha dari ketiga negara (Indonesia-Malaysia-Thailand) yang memainkan peran secara langsung dalam pelaksanaan LCS. Sedangkan *stakeholder* eksternal yang tidak terlibat secara langsung dalam teknis perumusan kebijakan dan pelaksanaan LCS. Namun, tetap memainkan peran penting dalam

mensosialisasikan dan mendukung pengembangan pelaksanaan LCS untuk lebih baik dan signifikan. Misalnya, perhimpunan atau asosiasi pengusaha, atase perdagangan, lembaga riset, konsultan perdagangan, Institusi kementerian, organisasi, dan lainnya.

Kerja sama dan koordinasi yang sinergis yang belum ditunjukkan oleh pihak internal dan eksternal dalam mensosialisasikan dan mendukung pelaksanaan LCS. Keduanya perlu membangun kerja sama dengan berkoordinasi secara sinergis dalam menyelesaikan berbagai tantangan dan hambatan yang terjadi secara operational yang sekiranya dapat menghambat perkembangan pelaksanaan LCS. Bagaskara (2022) menyampaikan hasil analisis SWOT Bank Indonesia terkait strategi kebijakan LCS, bahwa belum optimalnya dukungan dari Kementerian/Lembaga/BUMN dan lainnya menjadi salah satu ancaman dari pengembangan LCS. Hal ini karena berkaitan dengan LCS yang juga mengambil peran dalam upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang diatur dalam PP. No. 23 Pasal 26 (Bagaskara, 2022).

3) Komitmen Negara Pelaku Kerja Sama

Ketika dua atau lebih negara bersepakat untuk melakukan kerja sama, maka kedua atau lebih negara tersebut harus memperjuangkan hal yang telah disepakatinya untuk mencapai tujuan bersama. Keberhasilan untuk memperoleh manfaat dan mencapai tujuan bersama akan sulit dicapai apabila tidak adanya komitmen yang dibangun bersama. Karena komitmen diantara pelaku (negara) kerja sama menjadi faktor penting keberhasilan kerja sama tersebut. Dalam hal ini, kerja sama local currency settlement (LCS) juga akan sulit untuk menemukan hasil yang maksimal apabila ketiga negara (Indonesia-Malaysia-Thailand) tidak sama-sama

mendorong penguatan perdagangan dengan transaksi LCS.

Sjamsumar Dam dan Riswandi (1995) dalam tulisan Zulkifli (2014) menjelaskan bahwa pelaksanaan kerja sama internasional memerlukan dua syarat utama, yaitu pertama, adanya tindakan saling menghargai tujuan atau kepentingan nasional masing-masing anggota pelaku kerja sama. Karena tanpa saling menghargai akan sulit mencapai tujuan dari kerja sama yang ingin dicapai sejak awal. Kedua, perlunya keputusan dan komitmen bersama dalam mengatasi berbagai masalah atau persoalan yang terjadi. Dalam hal ini komunikasi dan konsultasi yang singergis juga diperlukan dalam mencapai keputusan bersama (Zulkifli, 2014).

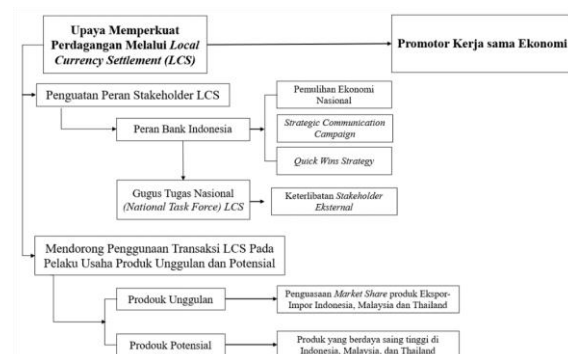
Dalam kasus ini, penguatan perdagangan melalui LCS Indonesia, Malaysia, dan Thailand akan sulit dicapai apabila salah satu negara atau bahkan ketiga negara belum berkomitmen secara serius dalam mengatasi berbagai persoalan yang terjadi selama upaya pengembangan LCS tersebut. Kurangnya dorongan bagi para pelaku usaha dari negara mitra tentunya juga menjadi salah satu penghambat atas kurangnya komitmen yang dibangun bersama. Upaya pelaksanaan LCS dalam mengurangi ketegantungan terhadap dolar dan mengurangi segala resiko yang ditimbulkannya, akan sulit dicapai apabila rendahnya motivasi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Hal ini tentu dapat mempengaruhi tujuan ketiga negara dalam pelaksanaan LCS dalam memperoleh kestabilan nilai mata uang, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan mendorong perdagangan yang progresif dengan mata uang lokal.

Upaya Memperkuat Perdagangan melalui Local currency Settlement

Pelaksanaan *local currency Settlement* (LCS) Indonesia, Malaysia dan Thailand sudah menunjukkan perkembangan yang baik dengan adanya *trend* positif dari kenaikan nilai transaksi

sejak efektif dilaksanakan pada tahun 2018. Namun perkembangan tersebut belum membawa dampak yang signifikan apabila dibandingkan dengan transaksi total perdagangan yang dilakun oleh ketiga negara. Penguatan LCS dalam memfasilitasi perdagangan sangat diperlukan dalam rangka mencapai stabilitas keungan negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui laju perdagangan yang progresif, dan mengurangi ketergantungan dolar AS beserta risiko-risiko keuangan lainnya, Bagi Indonesia sendiri, kerja sama LCS diharapkan mampu mengakselerasi Indonesia dalam mencapai pemulihan ekonomi nasional (Erwin Haryono, 2022). Oleh karena itu, untuk meningkatkan penggunaan LCS dalam rangka memperkuat sektor perdagangan, peneliti menganalisis bahwa setidaknya terdapat 2 hal yang dapat ditingkatkan dan didorong, yakni penguatan peran *stakeholder* dan penggunaan transaksi LCS oleh pelaku usaha produk unggulan dan potensial.

Gambar 4. Upaya penguatan Perdagangan Melalui Local Currency Settlement Framework



Gambar di atas menunjukkan urutan proses penguatan LCS. Berdasarkan data evaluasi dari Bank Indonesia dan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, penguatan peran stakeholder LCS dan dorongan pelaku usaha produk unggulan dan potensial dari ketiga negara, memainkan peran penting sebagai kunci keberhasilan dari pengembangan pelaksanaan LCS dalam mendorong kerjasama ekonomi, khususnya dalam memfasilitasi perdagangan.

1) Penguatan Peran Stakeholder dalam Pelaksanaan *Local Currency Settlement* di Indonesia

Relatif terbatasnya pemahaman pelaku usaha mengenai LCS, membuat kerja sama ini sulit berprogres, sehingga menjadi tantangan besar bagi *stakeholder* LCS itu sendiri. Hal ini terjadi karena sosialisasi LCS hanya dilakukan secara umum dan belum menasar pada target tertentu (Bank Indonesia, 2021). Oleh karena itu, upaya penguatan *stakeholder* menjadi penting untuk mengambil bagian dari pengembangan pelaksanaan kerja sama LCS. Penguatan *stakeholder* yang dimaksud dibagi dan dibedakan dari 2 sumber peran, yakni melalui peran Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas (*internal stakeholder*), dan peran institusi/lembaga lainnya (*external stakeholder*) melalui *National Task Force* (Gugus Tugas Nasional) *Local Currency Settlement* yang melibatkan peran yang lebih kompleks.

a. Peran Bank Indonesia (*Quick Wins* dan *Communication Campaign*)

Kebijakan *Local currency settlement* (LCS) bukan hanya semata-mata untuk menjaga kestabilan keuangan nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS. Lebih dari itu, LCS juga memainkan peran penting untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional terlebih pasca pandemi yang terjadi tahun 2020-2021 (Bagaskara, 2022). Oleh karena itu, Bank Indonesia menerapkan strategi *Quick Wins* sebagai upaya dalam mempercepat pengembangan LCS, yang meliputi:

- Kegiatan pengembangan data, digitalisasi, dan monitoring terhadap pelaksanaan LCS yang telah berlangsung sejak 2018
- Mengembangkan kerangka LCS untuk pendalaman pasar (sosialisasi secara massive dan targeted campaign melalui strategi komunikasi Bank Indonesia)

- Pengembangan Infrastruktur Pasar Keuangan atau *Financial Market Infrastructures* (FMI) untuk pelaksanaan LCS. FMI berperan penting dalam menjaga perkembangan dan fungsi pasar keuangan untuk dapat mendukung dan mendorong efektivitas transmisi kebijakan dan pembiayaan pembangunan ekonomi secara efisien.
- Pengembangan Cross-Border Payment System.
- Sinergi dukungan kementerian dan lembaga terkait

Sjamsudin (2021) menyampaikan bahwa strategi yang dilakukan oleh Indonesia melalui Bank Indonesia (BI) adalah dengan melakukan *LCS Campaign* yang secara strategis mengarah pada berbagai *stakeholder* mulai dari Perbankan, Kementerian, Lembaga, Asosiasi, Pelaku usaha atau Nasabah baik diterapkan secara *targeted* maupun *massive*. Dalam segi pelaksanaan, Indonesia juga terus melakukan penyempurnaan aturan LCS dengan otoritas di negara mitra (Malaysia dan Thailand) untuk mendukung optimalisasi implementasi LCS. Strategi yang dilakukan tentunya mengarah pada target pencapaian yaitu untuk meningkatkan transaksi LCS secara bertahap atas transaksi (rill) perdagangan dan investasi langsung. Selain itu, strategi ini juga diarahkan dapat meningkatkan pemahaman yang memadai bagi nasabah/korporasi sebagai pelaku usaha, sehingga dapat mendukung stabilitas nilai keuangan negara (Sjamsudin, 2021). Bank Indonesia (2021) menjelaskan strategi komunikasi (*Campaign*) dalam mendorong optimalisasi penggunaan LCS di dalam negeri melalui 4 cara utama yaitu website BI, talkshow atau webinar, diseminasi Logo dan tagline LCS, serta *collaborative campaign*.

b. Gugus Tugas (*Task Force*) Nasional *Local Currency Settlement (LCS)*

Seiring dengan hasil evaluasi perkembangan pelaksanaan *local currency Settlement* di Indonesia, masalah terkait belum optimalnya peran pendukung LCS seperti Institusi pemerintahan (Kementerian dan Lembaga) dalam mendorong pelaksanaan kerja sama LCS menjadi salah satu sorotan. Terlebih hal ini berkaitan dengan upaya pemerintah terkait Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca pandemi yang diatur dalam Pasal 26 PP No.23 tahun 2020. Bank Indonesia bersama dengan pihak yang terlibat dari sisi kementerian, di antaranya yaitu Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kementerian Perekonomian, dan Investasi, Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan, melakukan pembentukan Gugus Tugas Nasional (*National Task Force*). Pembentukan ini tidak hanya melibatkan pihak kementerian, namun juga melibatkan stakeholder lainnya seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), serta Asosiasi Bank *Appointed Cross Currency Dealers* (ACCD). Gugus Tugas Nasional LCS dibentuk sebagai upaya pemenuhan atau tindak lanjut dari kesepakatan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam mendorong pengembangan, akselerasi, dan perluasan penguatan LCS dalam mendukung upaya stabilitas sistem keuangan dan mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional pasca COVID-19 (Erwin Haryono, 2022). Hal ini juga disampaikan dalam UU No. 2 tahun 2020 mengenai upaya negara dalam mewujudkan stabilitas sistem keuangan dalam menangani pandemi Covid-19.

Dengan demikian, Adanya pembentukan Gugus Tugas Nasional ini artinya menjadi solusi kerja strategis antara *stakeholders* internal dan eksternal untuk sama-sama mendorong penguatan LCS untuk lebih berkembang.

Pembentukan Gugus Tugas Nasional ini secara efektif dimulai pada hari Rabu, 25 Mei 2022. Gugus Tugas Nasional menjadi bentuk sinergi dan kolaborasi antara *internal* dan *external stakeholders* yaitu Bank Indonesia bersama Kementerian/Lembaga dan asosiasi untuk pengembangan *local currency settlement* melalui berbagai program, yaitu:

- Program dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman (*awareness*) dengan sosialisasi *targeted/*
- Menciptakan aturan yang akomodatif bagi pelaku usaha dengan melakukan reformasi regulasi/kebijakan.
- Memberikan banyak peningkatan mulai dari percepatan layanan. Fasilitas, dan insentif dari penggunaan LCS.

Peneliti dalam hal ini menganalisis bahwa adanya Gugus Tugas Nasional dapat menjadi langkah baik yang dilakukan oleh Indonesia kedepan dalam mempercepat pengembangan LCS sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan, tidak hanya bagi Indonesia, melainkan negara mitra (Malaysia dan Thailand). Selain itu, rangkaian program dari Gugus tugas nasional juga dapat menyelesaikan berbagai tantangan (hambatan) berdasarkan evaluasi pelaksanaan LCS pada periode sebelumnya.

2) Penggunaan transaksi *Local Currency Settlement* untuk Produk Unggulan dan Potensial Perdagangan Bilateral

Sebagai bagian dari upaya memperkuat perdagangan melalui penggunaan *local currency settlement (LCS)*, mendorong pelaku usaha dari sektor produk unggulan dan potensial dalam bertransaksi dagang melalui LCS dapat menjadi salah satu cara

dalam meningkatkan performa dari penggunaan LCS itu sendiri.

Berdasar pada perolehan data tahun 2021 dari Kementerian Perdagangan, 20 produk unggulan Indonesia berhasil menguasai 55,6% dari pangsa ekspor produk-produk lainnya di Thailand. Adapun beberapa produk unggulan tersebut diantaranya Minyak Bumi (HS 270900) 16.8%, Batu Bara (HS 270119) 9.8%, Tembaga (HS 740311) 4.2%, Kacang (HS 80280) 2.7%, dan produk-produk industri skala besar seperti otomotif. Sedangkan, 20 produk impor unggulan Thailand di Indonesia yang hanya berhasil menguasai 35,9% dari total pangsa produk impor lainnya dari Thailand. Hal ini menunjukkan bahwa banyak produk-produk Thailand bernilai unggul, berdaya saing merata dan banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Adapun beberapa produk unggulan tersebut diantaranya Gula (HS 170114) 4.8% Mesin (HS 840820) 3.5%, dan produk-produk industri besar seperti otomotif (suku cadang kendaraan) (Kementerian Perdagangan, 2022).

Berbeda dengan Thailand, kegiatan ekspor Indonesia ke Malaysia berdasar perolehan data tahun 2021, menunjukkan bahwa 20 produk unggulan Indonesia berhasil menguasai 65% dari pangsa ekspor produk-produk lainnya di Malaysia. Adapun beberapa produk unggulan tersebut diantaranya Batu bara (HS 270119) 15.6%, Minyak sayur; Minyak Sawit Dan Fraksinya, (HS 151190) 9.6% Tembaga (HS 740311) 5.6%, dan produk bahan-bahan kimia beserta turunannya. Sedangkan 20 produk impor unggulan Indonesia dari Malaysia, mampu menguasai 57,6% dari total pangsa produk impor lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa 20 produk unggulan Malaysia tahun 2021 berhasil menguasai lebih dari setengah total pangsa produk impor lainnya. Produk unggulan Malaysia ke Indonesia didominasi oleh produk minyak bumi pada kode HS 6 digit (HS 270900), (HS 271012), dan (HS

271019) yang menguasai hampir 40% pangsa pasar di Indonesia.

Apabila dikaitkan dengan upaya memperkuat penggunaan LCS, pangsa pasar pada produk-produk unggulan dan potensial Indonesia ke Thailand dan Malaysia dapat menjadi referensi bagi pemerintah Indonesia. Mendorong pelaku usaha di sektor produk unggulan dan potensial dengan mensosialisasikan dan menawarkan penggunaan LCS sebagai alternatif transaksi perdagangan. Tentunya ditambah dengan kemudahan transaksi dan insentif. Sehingga para pelaku usaha produk tersebut lebih tertarik menggunakan LCS dalam penyelesaian transaksi perdagangan bilateral.

Local Currency Settlement Sebagai Promotor Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand

Kerja Sama *local currency settlement* (LCS) Indonesia, Malaysia, dan Thailand dilandaskan pada tujuan yang sama, yakni untuk mencapai kestabilan nilai mata uang lokal, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat sektor perdagangan dan investasi. Selain itu, tujuan lain dari kerja sama LCS adalah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dan resiko keuangan lainnya. Indonesia, Malaysia, dan Thailand sama-sama memiliki pengalaman buruk atas krisis keuangan/ekonomi yang terjadi pada 1997. Dimana ketiga negara terdampak krisis yang menjalar seperti efek domino (Krisis Keuangan Asia). Enrique O'Farrill dkk (1999) menjelaskan bahwa kerja sama ekonomi merupakan jawaban atas munculnya tantangan baru dalam proses globalisasi dan integrasi komersial. Tidak hanya dalam hubungan politik antar negara tetapi juga dalam hubungan ekonomi yang terjalin dalam konteks internasional. Adanya kerja sama LCS tentunya memberi ruang bagi Indonesia, Malaysia, dan Thailand untuk secara bersama mencapai tujuan dan memperoleh manfaat dari pelaksanaan LCS tersebut (O'Farrill, Fierro, Moraga, Pérez, & Vallejos, Economic cooperation AGCI, 1999). Peneliti dalam hal ini menganalisis kerja sama internasional LCS Indonesia-Malaysia-Thailand

menggunakan fitur-fitur konsep kerja sama yang ditawarkan oleh Enrique O'Farrill dkk (1999);

1. **Economic benefit:** Kerja Sama LCS Indonesia-Malaysia-Thailand didasarkan karena adanya upaya dari ketiga negara untuk mencapai tujuan bersama yakni dengan mengurangi ketergantungan terhadap dolar, meningkatkan stabilitas keuangan negara, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di ketiga negara melalui penguatan sektor perdagangan,
2. **Emphasis on the relationship between partners:** Hubungan diantara mitra kerja sangat penting untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaan kerja sama tersebut sehingga dapat memperoleh *mutual benefit*. Indonesia, Malaysia, dan Thailand merupakan tiga negara yang telah lama membangun hubungan baik, Selain tergabung dalam lingkup ASEAN, ketiga negara juga juga tergabung dalam lingkup kerja sama sub-regional (IMT-GT). Adanya kerja sama LCS Indonesia-Malaysia-Thailand dapat memperkuat hubungan dari ketiga negara khususnya dibidang ekonomi keuangan, perdagangan dan investasi.
3. **Inclusion of the Private Sector:** proses kerja sama bidang ekonomi akan secara langsung berkaitan dengan proses integrasi perdagangan. Kerja Sama LCS sangat berkaitan dengan integrasi perdagangan dari sisi transaksi. Dimana kerja sama ini mendorong penggunaan mata uang lokal sebagai alternatif transaksi kegiatan perdagangan.
4. **The changing role of the state:** Negara mengambil peran utama kerja sama ekonomi untuk memastikan pencapaian kualitas terbaik di arena internasional. Demikian pula, dan keterlibatan sektor swasta yang menjadi elemen penentu dalam proses kerja sama. Dalam kasus kerja sama LCS Indonesia-Malaysia-Thailand, negara melalui otoritas terkait (bank sentral) bertindak sebagai peran utama dalam berlangsungnya kerja sama dibantu dengan Bank ACCD selaku fasilitator. Dalam pelaksanaan dan pengembangan kebijakan

penerapan LCS, negara juga melibatkan pihak-pihak lainnya seperti institusi/lembaga/asosiasi pengusaha hingga pada pelaku usaha sebagai elemen penentu dalam proses kerja sama.

5. **Secure indirect short and medium term:** Tindakan atau kegiatan yang dilakukan dalam kerangka kerja sama ekonomi terfokus atau berpusat pada penciptaan kondisi untuk memfasilitasi perdagangan dan keterampilan kompetitif di pasar dunia. Pelaksanaan kerja sama *local currency* Indonesia-Malaysia-Thailand didasarkan pada upaya mendorong dan memfasilitasi sektor perdagangan dengan menggunakan transaksi mata uang lokal. Dalam periode 2018-2021 Kerja Sama LCS Indonesia-Malaysia-Thailand berhasil menunjukan tren yang baik (positif) dengan kenaikan nilai pada periode tersebut. LCS tentunya memiliki *room to grow* untuk memperkuat manfaat dari pelaksanaan LCS itu sendiri (O'Farrill, Fierro, Moraga, Pérez, & Vallejos, Economic cooperation AGCI, 1999).

Penjelasan fitur-fitur kerja sama ekonomi yang ditawarkan oleh Enrique O'Farrill dkk diatas, menunjukan bahwa kerja sama LCS Indonesia-Malaysia-Thailand mempunyai fitur-fitur lengkap, sehingga pelaksanaan LCS tentu mampu menjadi promotor kerja sama bidang ekonomi bagi Indonesia, Malaysia, dan Thailand khususnya dalam menfasilitasi perdagangan. Dengan demikian, upaya penguatan LCS dapat mengakselerasi capaian tujuan kerja sama tersebut.

LCS dalam Mempercepat Perutumbuhan Ekonomi Sub-Regional

Kerja sama ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand dalam memperkuat penerapan *local currency settlement (LCS)* dalam memfasilitasi perdagangan dapat menjadi wadah baru dari skema sub-regional. Terlebih menang Indonesia, Malaysia dan Thailand juga tergabung dalam IMT-GT (sub-regional) yang mempunyai objektif utama mendorong pertumbuhana dan pembangunan ekonomi diantara ketiga negara.

Chaia Siow Yue (1997) dalam tulisan Budi Ryanto (2015) menjelaskan bahwa salah satu unggulan dan manfaat dalam kerja sama sub-regional di antaranya yaitu mudah dilaksanakan dan dikelola secara politik, serta dianggap lebih fleksibel secara fungsi karena kerja sama sub-regional tidak memiliki ketentuan-ketentuan yang ketat, dalam arti menyesuaikan dengan kesepakatan pelaku kerja sama. Pelaksanaan kerja sama sub-regional pada dasarnya memiliki lingkup yang kecil, namun, hal ini menjadi alternatif dari berbagai kendala dan hambatan yang timbul atas *framework* dari kegiatan ekonomi yang jauh lebih kompleks pada level regional (**Riyanto, 2015**). Penerapan kerja sama LCS Indonesia-Malaysia-Thailand didasarkan pada tantangan dan kondisi yang sama. Ketiga negara memiliki pengalaman buruk atas krisis keuangan yang pernah terjadi. Selain itu, ketiga negara secara geografis berada pada wilayah yang berdekatan dengan status sebagai mitra dagang besar di lingkup Asia Tenggara. Ketiga negara memiliki tujuan dan kepentingan yang sama, yaitu untuk mengurangi ketergantungan dan menghindari segala risiko dari penggunaan dolar.

Local Currency Settlement (LCS) sebagai tawaran alternatif transaksi perdagangan dapat berperan penting dalam mempercepat objektif dari kerja sama ekonomi sub-regional pada area (*working group*) perdagangan. Pelaksanaan LCS selama periode 2018-2021 telah menunjukkan *trend* positif dari nilai transaksi yang mengalami kenaikan setiap tahunnya walaupun belum menunjukkan nilai yang signifikan. Upaya dalam memperkuat sektor perdagangan melalui penggunaan transaksi LCS telah dilakukan oleh berbagai *stakeholder* sebagai wujud pengembangan kebijakan LCS. Pengembangan LCS yang dilakukan tentunya dapat kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam memperkuat hubungan kerja sama ekonomi Indonesia, Malaysia, dan Thailand, khususnya sebagai kelompok sub-regional. Sehingga kedepan ketiga negara dapat menjadi mitra ekonomi mapan khususnya di sektor perdagangan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan *local currency settlement* (LCS) Indonesia, Malaysia dan Thailand sudah menunjukkan perkembangan yang baik dengan adanya *trend* positif dari kenaikan nilai transaksi sejak efektif dilaksanakan pada tahun 2018. Penguatan perdagangan melalui penggunaan *local currency settlement* sangat diperlukan dalam rangka mencapai stabilitas keuangan negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui laju perdagangan yang progresif, dan mengurangi ketergantungan dolar AS beserta risiko keuangan lainnya. Dengan demikian, penguatan perdagangan melalui LCS dapat menjadi promotor kerja sama ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand.

Adapun proses dalam memperkuat penggunaan LCS untuk mendorong kerja sama ekonomi perdagangan, yakni dengan melalui dua cara. **Pertama** penguatan peran *stakeholder* dalam pelaksanaan *local currency settlement*. Bank Indonesia sebagai internal *stakeholder* melakukan penerapan strategi *quick wins* dan *communication campaign* untuk memperkuat pelaksanaan LCS dalam mencapai pemulihan ekonomi nasional. kementerian, lembaga, dan asosiasi yang relevan sebagai *external stakeholder* dapat menjalankan peran strategis yang lebih kompleks melalui *National Task Force* (Gugus Tugas Nasional) *Local Currency Settlement*. Kolaborasi antara *stakeholder* tentu dapat mendorong pengembangan, akselerasi, dan perluasan manfaat dari penggunaan LCS untuk mendorong stabilitas sistem keuangan dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. **Kedua**, mendorong pelaku usaha produk unggulan dan potensial untuk menggunakan transaksi LCS sebagai alternatif penyelesaian transaksi perdagangan. Dengan mendorong pelaku usaha sektor produk unggulan dan potensial yang memiliki nilai persentase *share* yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, L. (2017, November 22). Intensitas Perdagangan Intra-Regional dalam ASEAN-3 (Indonesia, Malaysia, dan Thailand). *Journal of Research in Economics and Management*, 17, 313-322. doi:10.17970/jrem.17.1702012.ID
- Asian Development Bank. (2017). *IMT-GT LEADERS' DECLARATION ON THE ADOPTION OF THE IMT-GT IMPLEMENTATION BLUEPRINT 2017-2021*. Retrieved from Asian Development Bank: <https://www.adb.org/sites/default/files/related/41543/imt-gt-implementation-blueprint-2017-2021.pdf>
- Avianto, B. R., & Koestoer, R. H. (2010, Juni). Distorasi Kapasitas Perdagangan Inter-regional IMT-GT. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11, 44-57.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Nilai Ekspor Impor Indonesia*. Indonesia: Badan Pusat Statistik.
- Bagaskara, B. P. (2022, Maret 18). Perkembangan Implementasi Local Currency Settlement Indonesia, Malaysia, dan Thailand. (A. Nofansya, Pewawancara)
- Balassa, B., Wonnacott, P., Allais, M., Robinson, R., & Bertrand, T. J. (2020, November 11). *International trade*. Diambil kembali dari Encyclopedia Britannica: <https://www.britannica.com/topic/international-trade>
- Bank Indonesia. (2021, November 11). *Nilai Penyelesaian Transaksi Menggunakan Mata uang Lokal (LCS) Indonesia-Jepang Naik Signifikan*. Diambil kembali dari Bank Indonesia: https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2329521.aspx
- Bjelić, P. (2008, Oktober 9-10). *Fondation of the New Concept of International Trade*.
- Erwin Haryono. (2022, Mei 27). *Pembentukan Gugus Tugas Nasional Local Currency Settlement (LCS)*. Diambil kembali dari Bank Indonesia: https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2414022.aspx
- Kementerian Perdagangan. (2022, 05 24). *Neraca Perdagangan Dengan Mitra Dagang (Malaysia)*. Diambil kembali dari Satudata Perdagangan: <https://satudata.kemendag.go.id/balance-of-trade-with-trade-partner-country>
- Kementerian Perdagangan. (2022). *Produk Unggulan Dagang Indonesia*. Diambil kembali dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia PPEI: <http://ppei.kemendag.go.id/produk-unggulan-indonesia/>
- Mohammad Faisal. (2021, Agustus 5). *Implikasi Penerapan Local Currency Settlement (LCS) Indonesia-Tiongkok*. Diambil kembali dari CORE Indonesia: https://www.youtube.com/watch?v=fldSKIS1L_k&t=6354s
- O'Farrell, E., Fierro, J., Moraga, M. E., Pérez, E., & Vallejos, M. (1999, December). *Economic cooperation AGCI*. Diambil kembali dari http://www.agci.cl/attachments/article/643/documento_de_trabajo_cooperacion_economica_ingles.pdf.
- Riyanto, B. (2015). Peran dan Tantangan Kerjasama Subregional dalam Mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA): Pendekatan Multilevel Governance. *Jurnal INSIGNIA*, 33-34.
- Sjamsudin, R. (2021, November 17). *Webinar - Local Currency Settlement Framework Indonesia - Tiongkok*. Diambil kembali dari Bisniscom: <https://www.youtube.com/watch?v=gj3nmh75OrM&t=4373s>
- Zulkifli. (2014, Juli). KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL SEBAGAI SOLUSI RJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL SEBAGAI SOLUSI. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 3, 139-158.

BIOGRAFI

Aldy Nofansya, alumni program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran dengan fokus studi Kebijakan Luar Negeri, Pembangunan Internasional, Perdagangan Internasional dan Bisnis Manajemen Internasional.

Hasan Sidik merupakan Dosen di Departemen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran yang memiliki ketertarikan mengkaji Hukum Internasional.